

BAB II

KEBIJAKAN *CRYPTOCURRENCY* DI JEPANG

Bab ini berfokus pada analisa mendalam kebijakan *cryptocurrency* Jepang. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan berbagai poin penting mulai dari hal-hal yang mendasari awal mula dibentuknya kebijakan, bagaimana kebijakan tersebut direalisasikan, hingga tantangan dan peluang yang diambil oleh Jepang dari terciptanya kebijakan tersebut. Alasan pembahasan bab ini adalah untuk mengetahui kronologi awal, dinamika yang telah terjadi, serta tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Jepang untuk melengkapi pembahasan fenomena yang akan peneliti analisa pada bab selanjutnya.

2.1 Sejarah dan Dinamika *Cryptocurrency* di Jepang

Jepang termasuk salah satu negara yang sangat ramah terhadap *crypto* di dunia. *Cryptocurrency* atau mata uang *crypto* merupakan jenis mata uang digital yang memanfaatkan teknologi kriptografi untuk mengelola sistem dan memastikan keamanan setiap transaksinya. Berbeda dengan mata uang konvensional yang dikelola oleh pemerintah atau bank sentral, *cryptocurrency* beroperasi secara desentralisasi melalui jaringan yang dikenal sebagai blockchain.³³ *Cryptocurrency* memiliki berbagai kegunaan dalam dunia modern. Salah satu fungsi utamanya adalah

³³ Investopedia, 'Cryptocurrency Explained With Pros and Cons for Investment', *Investopedia.Com*, 2024 <<https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp>>.

sebagai salah satu pilihan alat tukar untuk transaksi digital, yang membuat pengguna dapat melakukan pembayaran atau transfer dana tanpa perlu perantara seperti bank.³⁴

Selain itu, *cryptocurrency* juga digunakan sebagai instrumen investasi, di mana individu membeli dan menahan aset crypto dengan harapan nilainya akan meningkat seiring waktu. Selain sebagai alat tukar dan investasi yang mudah diakses, *cryptocurrency* menawarkan potensi pemerataan fitur keuangan, terutama di wilayah yang kurang terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Cukup dengan akses internet, individu dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital global melalui penggunaan mata uang crypto³⁵. Namun, meskipun inovasi ini memiliki banyak manfaat, *cryptocurrency* juga menghadirkan risiko, termasuk volatilitas harga yang tinggi dan potensi penggunaan untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam serta kehati-hatian diperlukan bagi siapapun yang ingin terlibat dalam ekosistem *cryptocurrency*.³⁶

Sebelum Jepang menjadi negara ramah *crypto* dengan beragam kebijakannya ini, alasan yang mendasari tergeraknya usaha awal pemerintah yakni dikarenakan keamanan Nasional. Keamanan nasional ini dapat dirincikan lebih dalam lagi. Pertama keamanan siber, insiden peretasan *Mt. Gox* tahun 2014, membuat pemerintah

³⁴ CIMB NIAGA, 'Aset Kripto: Mengenal Pengertian, Fungsi-Fungsi, Dan Risiko', *Cimbniaga.Co.Id*, 2024 <<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/gayahidup/mengenal-aset-kripto-dan-fungsinya-di-indonesia>>.

³⁵ Coursera, 'How Does Cryptocurrency Work? A Beginner's Guide', *Coursera.Org*, 2025 <<https://www.coursera.org/articles/how-does-cryptocurrency-work>>.

³⁶ Allianz Indonesia, 'Memahami Apa Itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan Dan Kekurangannya', *Allianz.Co.Id*, 2021 <<https://www.allianz.co.id/explore/memahami-apa-itu-cryptocurrency-beserta-kelebihan-dan-kekurangannya.html>>.

menyadari perlunya regulasi untuk melindungi warganya dari ancaman siber yang terkait dengan *cryptocurrency*³⁷. Kedua, karena beragam keuntungan ekonomi seperti tambahan opsi investasi yang semakin beragam, efisiensi waktu dan biaya dan kemudahan lain yang ditawarkan inovasi finansial ini³⁸. Ketiga, sebagai bentuk pencegahan pencucian uang dan aktivitas ilegal. Kebijakan ini diambil untuk memenuhi standar internasional dan menjaga integritas sistem keuangan Jepang.³⁹

Dengan adanya berbagai keresahan yang dianalisa oleh Jepang, pelegalan inovasi menggunakan kebijakan yang adaptif akhirnya dipilih oleh pemerintah sehingga dapat diatur sekaligus dimanfaatkan potensinya. Selain itu, dengan kasus pencurian Mt. Gox, dan banyaknya pengguna Jepang di masa awal inovasi ini trending, lambatnya respon pemerintah Jepang akan memperburuk reputasi Jepang, termasuk melindungi investasi asing langsung (FDI) dari dampak negatif dari pencucian uang atau kegagalan regulasi⁴⁰. Maka dari itu, sejak 2017 negara ini memilih untuk memberlakukan dan mulai meregulasi *cryptocurrency*. Setelahnya di tahun 2018 negara ini mulai mengadopsi kebijakannya secara ketat dan menyeluruh sehingga membuat Jepang menjadi salah satu negara yang mengawali terciptanya ekosistem masyarakat yang ramah dan aman terhadap inovasi mata uang digital

³⁷ Eulisa Safitri, 'Kebijakan Melegalisasi Cryptocurrency Sebagai Upaya Pemerintah Jepang Mengamankan Keamanan Nasional Jepang', *Journal of International Relations*, 5.2 (2019), 271–80 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/viewFile/23275/21292>>.

³⁸ Faizal Hafied, 'Kebijakan Penerapan Cryptocurrency Dalam Rangka Ketahanan Nasional', *Lembaga Pertahanan Nasional*, 2022 <<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-10220000000037/swf/7596/33 FAIZAL HAFIED.pdf>>.

³⁹ Irwan and Ary Julianto, 'Jepang Perketat Aturan Kripto Untuk Lawan Pencucian Uang', *VOI.Id*, 2023 <<https://voi.id/teknologi/282308/jepang-perketat-aturan-kripto-untuk-lawan-pencucian-uang>>.

⁴⁰ Safitri, *Op. Cit.*

tersebut. Bahkan dengan kebijakan yang telah terlaksana hingga saat ini, pemerintah Jepang menilai mampu untuk mengembangkan ekosistem sosial yang lebih modern menggunakan industri teknologi digital Web3 di negaranya.⁴¹

Menuju pada pembahasan yang lebih jauh, sebelumnya peneliti akan memaparkan hal apa saja yang mengawali Jepang untuk mulai memberlakukan dan mengembangkan kebijakan *cryptocurrency* ini sehingga dapat mendukung proses pengembangan teknologi digital Web3 yang saat ini mulai direalisasikan oleh Jepang. Dalam menjelaskan sejarah dan dinamika kebijakan *cryptocurrency* di Jepang, peneliti akan membagi penjelasannya supaya lebih terperinci ke dalam tiga masa. Tiga masa ini berisi dinamika yang perlu diketahui sebagai pelengkap dalam analisa bab selanjutnya.

2.1.1. Masa Awal Kebijakan *Cryptocurrency*

Februari 2014 merupakan waktu yang mengawali beragam masalah *cryptocurrency* yang semakin kompleks. Permasalahan baru terhadap inovasi sebenarnya telah muncul lebih awal, beriringan dengan semakin trending nya inovasi ini. Namun uniknya, munculnya permasalahan yang semakin kompleks membuat *cryptocurrency* ini semakin dikenal. Pada Februari 2014 ini, perusahaan “Mt. Gox”, bursa bitcoin terbesar saat itu mengalami krisis yang membuatnya menghentikan semua perdagangan. Perusahaan bursa yang memegang lebih dari 70% aset bitcoin seluruh dunia, yang bertempat di Shibuya, Tokyo, menyatakan telah mengalami

⁴¹ So Saito and Kazuki Imanari, ‘Crypto Regulations in Japan 2024’, *Lexology (So & Saito Innovative Lawyers)*, 2024 <<https://innovationlaw.jp/en/crypto-regulations-in-japan-2024/>>.

peretasan dan masalah manajerial. Hal ini memberikan efek domino pada harga dan keraguan serius masyarakat global mengenai keamanan bursa *cryptocurrency*.

Maret 2014, Mt. Gox akhirnya mengajukan kebangkrutan secara resmi setelah mengklaim kehilangan sekitar 850.000 bitcoin (sekitar USD 450 juta) akibat peretasan. Pengajuan ini menjadi salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah *cryptocurrency*. Efek domino yang dihasilkan cukup besar seperti menurunnya harga pasar *crypto*, mengurangi kepercayaan dan mendorong regulator untuk mempertimbangkan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat. Menyusul kepanikan yang dihasilkan oleh insiden ini, negara-negara mulai merumuskan regulasi yang lebih ketat terhadap perdagangan *cryptocurrency*.⁴²

Jepang sendiri, sebagai negara yang menaungi perusahaan ini mulai serius meningkatkan perhatian terhadap perlindungan konsumen dan keamanan bursa dengan merumuskan pedoman baru. Mengesampingkan dampak negatifnya, pada periode ini ternyata cukup banyak pengembang dan investor yang terlanjur terjun, mulai mendalami dan berminat terhadap teknologi *blockchain*. Singkat cerita, proyek inovatif kedua “Ethereum” (yang saat ini menjadi jenis koin terbesar kedua) mulai diperkenalkan, dan membuahkan hasil pengembangan aplikasi desentralisasi dengan kontrak pintar⁴³. Runtuhnya simbol pertumbuhan *cryptocurrency* Mt. Gox, seakan

⁴² Erika Rasure and Pete Rathburn, ‘Apa Itu Mt. Gox? Definisi, Sejarah, Keruntuhan, Dan Masa Depan’, *Investopedia.Com*, 2024 <<https://www.investopedia.com/terms/m/mt-gox.asp>>.

⁴³ Andreas Antonopoulos, *Mastering Ethereum* (O’Reilly Media, 2018) <https://books.google.co.id/books/about/Mastering_Ethereum.html?id=f4T2zgEACAAJ&redir_esc=y>.

menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya keamanan dan transparansi dalam ekosistem *cryptocurrency*.

Mei 2016, akhirnya Jepang mengesahkan Undang-Undang mata uang virtual pertama di dunia. Pengesahannya ini sebagai bentuk amandemen terhadap “Undang-Undang Layanan Pembayaran” (PSA). Undang-Undang ini merupakan pengaturan pembayaran menggunakan koin *crypto* yang ramah terhadap startup dan bertujuan mendorong industri. Hanya butuh jarak setahun, pada April 2017 kemudian peraturan tersebut mulai diberlakukan⁴⁴. Tahun 2017 menjadi titik balik dari keraguan *cryptocurrency*, dimana saat itu terjadi fenomena “ledakan ICO” di seluruh dunia, dan harga *crypto* meningkat. Volume perdagangan bursa Jepang menjadi yang nomor 1 di dunia. Banyak pemain asing datang ke Jepang untuk memulai bisnis mereka. *Initial Coin Offering* (ICO) adalah metode pengumpulan dana di mana perusahaan menerbitkan token *crypto* baru dan menjualnya kepada investor untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk pengembangan proyek mereka. Ratusan ICO diluncurkan tahun itu, menjadikannya sebagai tahun paling produktif untuk penggalangan dana berbasis *cryptocurrency*. Banyak startup baru dengan ide-ide inovatif yang memanfaatkan kesempatan ini.⁴⁵

⁴⁴ Adrian Zmudzinski, ‘Japan’s Financial Regulator to Introduce New ICO Regulations’, *Cointelegraph.Com*, 2018 <<https://cointelegraph.com/news/japans-financial-regulator-to-introduce-new-ico-regulations>>.

⁴⁵ Saito and Imanari, *Op. Cit.*, hal. 37

2.1.2. Masa Regulasi Yang Lebih Ketat

Meskipun banyak ICO yang berhasil, beberapa di antaranya ternyata adalah penipuan atau tidak dapat memenuhi ekspektasi. Hal ini menyebabkan peningkatan perhatian dari regulator di berbagai negara setelah periode tersebut. Selain itu, berita peretasan besar-besaran perusahaan bursa “Coincheck”, menjadikan masalah peretasan sebagai hal yang sulit diberantas dengan adanya kebijakan saat itu. Di tahun 2018, sekitar JPY 58 miliar (setara USD 500 juta) berhasil di curi dalam bentuk koin NEM (XEM), setelah sebagian besar asetnya di hot wallet yang terhubung langsung ke internet berhasil diakses peretas. Setelah insiden ini, pemerintah Jepang memperketat operasional regulasi. Banyak bursa menerima perintah perbaikan bisnis dan perintah penghentian, mengakibatkan aktifitas pasar menyusut.⁴⁶

Mei 2020, Jepang mulai meluncurkan kebijakan keamanan yang lebih kuat. *Financial Instruments and Exchange Act (FIEA)* dan *Payment Services Act (PSA)* terbaru yang sudah diamandemenkan mulai diberlakukan. Terdapat beberapa peningkatan dan penyesuaian kebijakan di tahun 2020 untuk memperkuat keamanan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan perusahaan bursa. Pada pembaruan PSA 2020 sendiri terdapat beberapa pembaruan. pertama perluasan cakupan, yang awalnya “*cryptocurrency*” berubah menjadi “aset virtual”, sehingga kemudian peraturan ini dapat mencakup token digital selain mata uang *crypto*. Kedua,

⁴⁶ Yoichi Tsuchiya and Naoki Hiramoto, ‘How Cryptocurrency Is Laundered: Case Study of Coincheck Hacking Incident’, *Forensic Science International: Reports*, 4 (2021), 100241
<<https://doi.org/10.1016/j.fsir.2021.100241>>.

pendaftaran legalitas, persyaratan standar nasional untuk anti pencucian uang (AML) dan perlindungan konsumen bagi segala jenis penyedia layanan, pertukaran maupun wallet. Ketiga, pengaturan standar keamanan dan manajemen risiko bagi penyedia layanan yang lebih ketat.

Peraturan kebijakan FIEA 2020 juga turut disesuaikan kualitas keamanannya. Peraturan pertama yakni berkenaan dengan klasifikasi untuk token, berbagai token perlu memenuhi kriteria tertentu agar bisa dibedakan menjadi jenis token yang diinginkan sesuai standar Nasional. Kedua, terdapat penyesuaian standar bagi *Initial Coin Offerings* (ICO) yang akan beredar. Ketiga berupa peningkatan standar pengungkapan transparansi (baik identitas dan prosesnya) perusahaan yang akan menerbitkan token sekuritas⁴⁷. Perubahan-perubahan dalam PSA dan FIEA pada tahun 2020 menunjukkan komitmen Jepang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan pesat industri *cryptocurrency* sambil memastikan perlindungan konsumen dan pemantauan yang lebih baik. Pembaruan ini membantu memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi penyedia layanan *cryptocurrency* dan pengguna, sekaligus mendorong inovasi yang aman dan bertanggung jawab.⁴⁸

⁴⁷ Chainalysis, 'Japan's Cryptocurrency Regulation Updates: What You Need to Know', *Chainalysis.Com*, 2020 <<https://www.chainalysis.com/blog/japan-cryptocurrency-regulation-updates-2020/>>.

⁴⁸ Saito and Imanari, *Op. Cit.*, hal. 37

2.1.3. Masa di Mana Web3 Menjadi Strategi Nasional

Sejak tahun 2021 pemerintah Jepang mulai menyatakan bahwa Web3 akan menjadi salah satu strategi pertumbuhan Nasional. Web3, atau Web 3.0, merupakan konsep evolusi internet yang mengedepankan desentralisasi, di mana kontrol dan kepemilikan data tidak lagi terpusat pada segelintir perusahaan besar maupun pemerintah, melainkan didistribusikan langsung kepada pengguna. Sistem inti Web3 sendiri menggunakan blockchain sebagai teknologi utama, yang memungkinkan terciptanya jaringan internet yang lebih transparan dan aman⁴⁹. Dalam praktiknya, Web3 memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali penuh atas data pribadi mereka, bertransaksi secara langsung tanpa perantara, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti organisasi otonom terdesentralisasi (DAO). Hal ini berbeda dengan model Web 2.0, di mana platform terpusat seringkali memonetisasi data pengguna tanpa memberikan kontrol atau keuntungan yang setara kepada pemilik data.⁵⁰

Korelasi antara Web3 dan *cryptocurrency* sangat erat, karena keduanya berlandaskan pada teknologi blockchain. *Cryptocurrency* berfungsi sebagai alat transaksi dan insentif ekonomi dalam ekosistem Web3, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan token sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam jaringan. Selain itu, banyak aplikasi Web3 menggunakan aset digital seperti aset crypto sebagai

⁴⁹ Amazon, 'Apa Itu Web3?', *Aws.Amazon.Com*, 2025 <<https://aws.amazon.com/id/what-is/web3/>>.

⁵⁰ Crypto.com University, 'Apa Itu Web3? Panduan Komprehensif', *Crypto.Com*, 2022 <<https://crypto.com/id/university/what-is-web3>>.

mata uang utama dalam transaksi mereka, menciptakan ekonomi digital yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. Web3 tidak hanya merevolusi cara kita berinteraksi di dalam dunia internet, tetapi juga membuka peluang baru dalam hal kepemilikan digital, transaksi tanpa perantara, dan kontrol data pribadi. semua fitur tersebut didukung oleh teknologi blockchain dan cryptocurrency yang inovasinya telah muncul lebih dulu.⁵¹

Dengan kata lain, untuk mengatur penyebaran transformasi Web3 yang efektif dan sehat, diperlukan kebijakan yang mendukung mengenai inovasi sejenis seperti blockchain dan *cryptocurrency*. Hal ini sejalan dengan berbagai langkah yang hingga saat ini telah dilakukan pemerintah Jepang. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang adalah salah satu instansi pemerintah yang aktif dalam mendukung dan menyusun strategi nasional ini. METI juga turut mengeluarkan beberapa dokumen dan pernyataan yang menjelaskan rencana mereka terkait pertumbuhan ekosistem Web3⁵². Di bawah strategi ini, tim proyek Web3 LDP juga turut aktif dalam mengeluarkan rekomendasi kebijakan bertajuk *Web3 White Paper* untuk mendorong penerapan Web3 setiap tahun sejak 2022.

⁵¹ Ari Budi Santosa, 'Apa Itu Web 3.0 Dan Apa Kelebihannya?', *Pintu.Co.Id*, 2022 <<https://pintu.co.id/academy/post/web3-adalah>>.

⁵² Bryan Lam and Brady Werkheiser, 'Web3 in Japan: A Complete Overview (2024)', *Alchemy.Com*, 2024 <<https://www.alchemy.com/overviews/web3-in-japan>>.

Gambar 2.1 Inovasi Digital Web 1, Web 2, dan Web 3



Teknologi Web3 sendiri merupakan transformasi yang lebih modern daripada perkembangan teknologi sebelumnya. Web 1.0 merupakan masa dimana internet satu arah, mirip perpustakaan digital yang hanya yang menampilkan teks dan gambar. Pada masa ini pengguna hanya informasi dapat menyebar lebih cepat daripada pertukaran informasi tradisional. Web 2.0 merupakan versi internet yang memungkinkan dua arah. Pada masa ini muncul jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan sejenisnya yang memungkinkan pengalaman berkomunikasi dua arah antar *user*. Bahkan inovasi *livestreaming* dan *marketplace* juga tercipta di era ini. Kemudian, Web 3.0 merupakan tahap terbaru dalam perkembangan internet. Beberapa fitur utama dari Web 3.0 meliputi kemampuan komputer untuk memproses informasi secara lebih

cerdas, penerapan kecerdasan buatan (AI) dan kontrak pintar untuk komputasi, pengelolaan proses-proses kompleks, serta penerapan sistem desentralisasi melalui blockchain. Transformasi digital inilah yang sejak 2022 mulai diimplementasikan oleh Jepang, karena fiturnya yang menarik dan memberikan banyak keuntungan bagi negara tersebut jika berhasil menjadi negara pelopor pertama dalam inovasi Web3.

Beragam upaya telah dilakukan Jepang untuk mensukseskan adaptasi digital ini. Pada Juni 2022, Jepang menjadi salah satu negara yang mengesahkan regulasi tentang *stablecoin* pertama di dunia. pemerintah menyadari perlunya pengaturan interoperabilitas yang ditawarkan oleh *stablecoin* untuk mengamankan setiap transaksi yang terjadi dalam teritori Jepang. Hasilnya, Undang-Undang ini dibuat sebagai amandemen dari aturan FSA dan perbankan.

“Regulasi ini mengamandemen *Banking Act, Payment Services Act, and the Trust Business Act*, dll. *Stablecoin* yang sah dan diakui oleh pemerintah yakni diterbitkan oleh bank, provider jasa transfer dana digital, dan *trust companies* penerbit *stablecoin*. Intermediary (penyedia layanan pertukaran, wallet, dsb) yang menangani *stablecoin*, juga harus teregistrasi dan menjalankan KYC (Know Your Customer), AML/CFT.”

Kerangka *Stablecoin* Jepang ini memiliki ciri khusus yang mengutamakan perlindungan konsumen, standarisasi keuangan stabil, dan penyesuaian dengan aturan global. Pemisahan 95% aset pengguna di dompet dingin, pengawasan sektor swasta oleh *Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association (JVCEA)*

sebagai *Self-Regulatory Organization* (SRO) merupakan langkah Jepang dalam membangun kerangka pengawasan berbasis kolaborasi. Pemerintah dan asosiasi swasta bekerjasama dalam menjamin perlindungan konsumen dan stabilitas pasar crypto domestik, sekaligus menjadi negara acuan dalam inovasi digital global.⁵³

Peningkatan regulasi global ini memberikan kejelasan hukum dan dapat mengeliminasi broker atau provider crypto trading yang tak kompeten. Pada Tahun 2022 terjadi keruntuhan beberapa perusahaan bursa seperti Terra Luna dan Grup FTX⁵⁴. Runtuhnya berbagai perusahaan ini disebabkan karena berbagai alasan seperti kebangkrutan, kurangnya kapabilitas terhadap penyesuaian standar kebijakan global yang saat itu menjadi lebih ketat, dan permasalahan lainnya⁵⁵. Pada tahun yang sama di Jepang, akhirnya muncul inisiatif transformasi Web3 yang di inisiasi oleh *Liberal Democratic Party* (LDP), partai yang mendominasi hampir pada setiap periode perpolitikan Jepang.

Meskipun LDP merupakan sebuah partai politik, dominasi perpolitikannya membuat keterlibatan langsung dalam berbagai inisiatif transformasi digital ini. Dampak dominasi ini menjadikan batas antara partai yang berkuasa dan pemerintah seringkali kabur. Sebagai partai mayoritas dalam kursi perpolitikan saat itu, LDP jadi memiliki peran langsung dalam pembentukan dan implementasi kebijakan

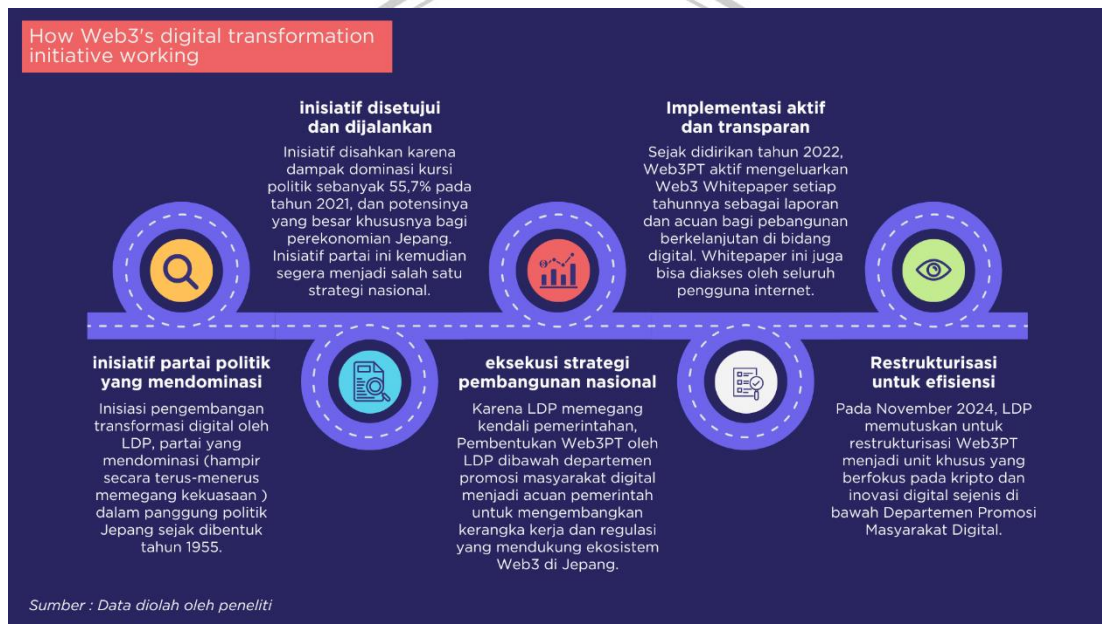
⁵³ Financial Services Agency Japan, 'Regulating the Crypto Assets Landscape in Japan', *Op. Cit.*, hal. 45

⁵⁴ Chandra Dwi, 'Dari Terra Hancur Hingga FTX Bangkrut, Kripto Bakal Punah?', 2022 <<https://www.cnbcindonesia.com/market/20221121135139-17-389864/dari-terra-hancur-hingga-ftx-bangkrut-kripto-bakal-punah>>.

⁵⁵ Financial Services Agency Japan, 'Regulating the Crypto Assets Landscape in Japan'.

pemerintah. Berkat inisiatif dari kekuatan dominan ini pula, inovasi Web3 ini kemudian menjadi salah satu rencana pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, meskipun Web3 *Project Team* (Web3PT), tim pengembangannya yang bertanggung jawab penuh tersebut berada dibawah Departemen Promosi Masyarakat Digital, personel, strategi, dan prosesnya secara garis besar berasal dari partai.⁵⁶

Gambar 2.2 Roadmap Inisiatif Web3 Dijalankan



Tahun 2023 Jepang kemudian memberlakukan regulasi *stablecoin*. Komitmen pengembangan Web3 masih dipegang erat oleh Jepang. Pada tahun ini Jepang menggelar “WebX Conference”, pameran setingkat global mengenai inovasi teknologi dan digital. Dalam acara itu, Perdana Menteri Fumio Kishida dalam

⁵⁶ The Economist, ‘Bagaimana LDP Mendominasi Politik Jepang’, *Economist.Com*, 2021 <<https://www.economist.com/the-economist-explains/2021/10/28/how-the-ldp-dominates-japans-politics>>.

pidatonya turut mempromosikan komitmen Jepang dalam mengembangkan inovasi digital Web3. hingga saat ini, Web3 LDP masih aktif mengeluarkan *Web3 White Paper* tiap tahunnya. Dukungan pemerintah Jepang terhadap Web3 menunjukkan komitmen mereka untuk mengadopsi dan mempromosikan teknologi inovatif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan keamanan digital.⁵⁷

Perlu diingat kembali, pengembangan Web3 ini ternyata masih perlu diiringi dengan peningkatan kebijakan *cryptocurrency* yang lebih ketat. Permasalahan berupa peretasan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Pada Mei 2024, masih terjadi peretasan atas perusahaan DMM Bitcoin yang mengakibatkan kerugian sekitar JPY 48,2 miliar dalam bentuk Bitcoin⁵⁸. Seluruh peretasan yang terjadi dalam waktu dekat ini mencerminkan tantangan yang terus-menerus dihadapi oleh industri *cryptocurrency* dalam hal keamanan dan perlindungan pengguna. Regulator dan bursa di seluruh dunia perlu terus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk trader dan investor.

2.2 Tantangan dan Peluang Kebijakan *Cryptocurrency* Jepang

Jepang telah menjadi salah satu negara terdepan dalam adopsi dan regulasi *cryptocurrency*. Meskipun telah mengembangkan kerangka hukum yang

⁵⁷ Kiki A. Ramadhan, 'Perdana Menteri Jepang Menegaskan Dukungan Penuh Untuk Web3', *Nanovest.Io*, 2024 <<https://news.nanovest.io/web-3/perdana-menteri-jepang-menegaskan-dukungan-penuh-untuk-web3>>.

⁵⁸ Saito and Imanari, *Op. Cit.*, hal. 37

komprehensif, tantangan dan peluang terus muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Dalam sub bab ini, kita akan membahas tantangan yang dihadapi Jepang dalam kebijakan *cryptocurrency* serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk pengembangan Web3. Tantangan terbesar pertama kebijakan ini hingga saat ini masih tertuju pada keamanan dan peretasan. Dari 2023 hingga saat ini saja telah ada lebih dari 5 pasar bursa di dunia yang terkonfirmasi terkena peretasan, dan salah satunya adalah perusahaan asal Jepang yakni DMM yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya⁵⁹. Perkembangan peningkatan keamanan masih terus diperjuangkan oleh berbagai negara. Tak terkecuali dengan Jepang, yang selalu memberikan statement tentang usahanya dalam meningkatkan keamanan siber nya secara konsisten di setiap FSA mengeluarkan laporan.

Sementara itu, regulasi yang ketat, serta beban pajak yang masih tergolong sangat tinggi bisa membuat masyarakat cukup jenuh dengan peraturan yang ada. Meskipun Jepang merupakan salah satu negara yang paling progresif dalam pengadopsian inovasi ini, nyatanya di tahun-tahun terakhir penyesuaian yang sangat dibutuhkan menjadi terkesan lamban. Pemerintah mengenakan pajak atas keuntungan dari aset crypto hingga 55% untuk individu dengan penghasilan tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan pajak atas keuntungan modal dari saham yang hanya sekitar

⁵⁹ Dhemas Putra, '5 Peretasan Bursa Kripto Paling Menghebohkan Di Tahun 2024', *Blockchainmedia.Id*, 2024 <<https://blockchainmedia.id/5-peretasan-bursa-kripto-paling-menghebohkan-di-tahun-2024/>>.

20%. hasilnya, kasus yang cukup ekstrem muncul dalam perpajakan warisan. Dalam beberapa situasi, ahli waris dari investor crypto dikenakan pajak warisan yang mencapai hingga 110% (berupa pajak warisan, ditambah pajak penghasilan, dan pajak penduduk lokal) dari nilai aset crypto yang diwarisi. Beban pajak ini akhirnya memaksa keluarga ahli waris untuk merugikan dirinya sendiri, bukannya memperoleh untung dari hasil warisan, nyatanya ahli waris perlu menjual aset crypto warisan, dengan lebih banyak aset miliknya sendiri hanya untuk memenuhi kewajiban pajak yang dibebankan. Kondisi ini memunculkan tantangan serius bagi Jepang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan kompetitif di pasar global.⁶⁰

Sistem perpajakan ini tidak hanya berlaku untuk keuntungan yang sudah direalisasikan, tetapi juga terkadang dikenakan pada keuntungan yang belum direalisasikan dalam kasus tertentu. Kondisi ini menimbulkan beberapa masalah serius. Salah satunya, banyak investor merasa terbebani dengan kewajiban pajak yang tidak proporsional terhadap keuntungan yang mereka peroleh, sehingga mereka cenderung enggan untuk terus berinvestasi di sektor ini. Tantangan kebijakan pajak ini akan semakin berbahaya jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Penurunan pemasukan negara lambat laun akan berkurang dikarenakan adanya perpindahan dana investasi ke negara lain yang menawarkan pajak lebih kompetitif seperti, Singapura dan Uni Emirat Arab (UEA) yang menerapkan bisnis crypto

⁶⁰ Graham Smith, 'Gutting Satoshi — How Bitcoin Can Be Taxed at 110% in Japan', *Cryptopolitan.Com*, 2024 <<https://www.cryptopolitan.com/gutting-satoshi-how-bitcoin-can-be-taxed-at-110-in-japan/>>.

dengan peraturan yang lebih ringan, dan menantang posisi Jepang. Sementara itu, terdapat beberapa inovasi baru lainnya yang belum diamankan oleh Jepang seperti *Exchange-Traded Funds* (ETF) berbasis crypto yang juga menuntut pembaruan berkelanjutan pada kerangka regulasi Jepang.⁶¹

Selain itu, tantangan juga bisa muncul dari bentuk inovasinya. Hingga saat ini, Jepang tetap berhati-hati dalam mengatur produk keuangan terkait *cryptocurrency*. Misalnya, otoritas Jepang mempertahankan sikap konservatif terhadap persetujuan exchange-traded funds (ETF) berbasis crypto. Sistem pengelolaan berbagai jenis crypto yang diperdagangkan dalam pasar saham ini sempat membingungkan pemerintah Jepang. Pasalnya, crypto dengan peraturannya sendiri, bisa dicampur dan masuk dalam pasar trading saham. Hingga saat ini pemerintah belum berencana membahas hal tersebut karena terdapat ketidakaturan dan terjadi regulasi yang tumpang tindih jika inovasinya di sahkan. Jepang memilih mempelajarinya dahulu dengan hati-hati, dan tidak langsung memutuskan terjun meregulasi meskipun produk serupa telah disetujui di pasar lain seperti Amerika Serikat dan Hong Kong. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara mendorong inovasi dan memastikan stabilitas serta keamanan pasar keuangan domestik⁶².

Contoh lain dari tantangan yang dihadapi Jepang saat ini yakni Regulasi konkrit terhadap NFT. Nyatanya, hingga tahun 2025 Jepang belum memiliki regulasi

⁶¹ Nesi, *Op. Cit.*, hal. 5

⁶² Ministry of Economy Trade and Industry, 'Approach to Improving Web3 . 0 Business Environment: From Token Economies to the Foundation of Society5.0', *Op. Cit.*, hal. 66

husus yang secara mandiri mengatur Non-Fungible Token (NFT). Regulasi NFT di Jepang masih bersifat adaptif dan berbasis fungsi, bergantung pada kegunaan ekonomi dan konteks penggunaannya. Sistem pengaturan yang adaptif “tergantung penggunaan” ini kerap kali hadir ketika suatu inovasi di Jepang masih berada dalam tahap awal perancangan regulasi. Berdasarkan pernyataan resmi FSA di tahun 2023 menyebutkan bahwa “berbagai token yang diterbitkan untuk diperdagangkan di blockchain, termasuk item dan konten, dapat dikategorikan sebagai aset crypto”⁶³. NFT tersebut kemudian dapat diklasifikasikan sebagai aset crypto tipe 2 sesuai kerangka Financial Instruments and Exchange Act (FIEA).⁶⁴

Dari sisi perlindungan kekayaan intelektual, kurangnya pengaturan kongkrit terhadap NFT Jepang menghadapi tantangan serius berupa maraknya penerbitan NFT tanpa izin dari pemilik konten. Dalam laporan yang disertakan dalam NFT Whitepaper menyatakan “NFT diterbitkan dan dijual oleh pihak selain pemilik konten tanpa izin mereka”. Di sisi lain, tidak adanya ketentuan hukum nasional yang mengatur hak royalti pada distribusi sekunder menyebabkan mekanisme royalti NFT bersifat opsional dan masih sangat tergantung pada kebijakan internal masing-masing platform.⁶⁵

⁶³ Tertera pada lampiran hal. 98

⁶⁴ Tertera pada lampiran hal. 99

⁶⁵ Liberal Democratic Party, ‘NFT White Paper Japan ’ s NFT Strategy for the Web 3 . 0 Era Project Team Regarding NFT Policies’, *LDP Japan*, April, 2022 <https://www.taira-m.jp/Japan%27s NFT Whitepaper_E_050122.pdf>.

Dari sisi kebijakan anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT), NFT belum tunduk pada regulasi “secara otomatis” kecuali jika NFT tersebut diklasifikasikan sebagai aset crypto. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan, “Regulasi pencegahan pencucian uang tidak berlaku “secara otomatis” untuk transaksi NFT, kecuali NFT dikategorikan sebagai aset crypto” Begitu pula dalam konteks perpajakan, NFT di Jepang masih mengikuti prinsip pajak umum seperti pajak penghasilan dan konsumsi, tanpa ada peraturan pajak khusus yang secara eksplisit berlaku untuk NFT⁶⁶. Dengan demikian, posisi hukum NFT di Jepang ditentukan melalui pendekatan berbasis fungsi, yang berarti bahwa aspek legal NFT sangat bergantung pada cara NFT digunakan dan fitur ekonominya. Belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur NFT secara menyeluruh menunjukkan bahwa Jepang masih berada dalam tahap eksperimental, meskipun telah menunjukkan arah kebijakan melalui dokumen-dokumen seperti NFT Whitepaper Japan dan Web3 White Paper 2024.

Posisi regulasi ketat dan kebijakan pajak yang kurang kompetitif membuat Jepang berada dalam posisi dilematis. Nyatanya, jika melihat sisi positif kebijakan, Negara inilah yang hingga saat ini banyak diakui masyarakat internasional sebagai kebijakan paling terstruktur dan cukup melindungi investor maupun penyedia layanan. Banyak juga hal lain yang mulai pemerintah negara ini kerjakan demi mempermudah pengembangan Web3 di negaranya. Salah satu contohnya seperti

⁶⁶ Liberal Democratic Party, ‘NFT White Paper Japan ’ s NFT Strategy for the Web 3 . 0 Era Project Team Regarding NFT Policies’, *Op. Cit.*

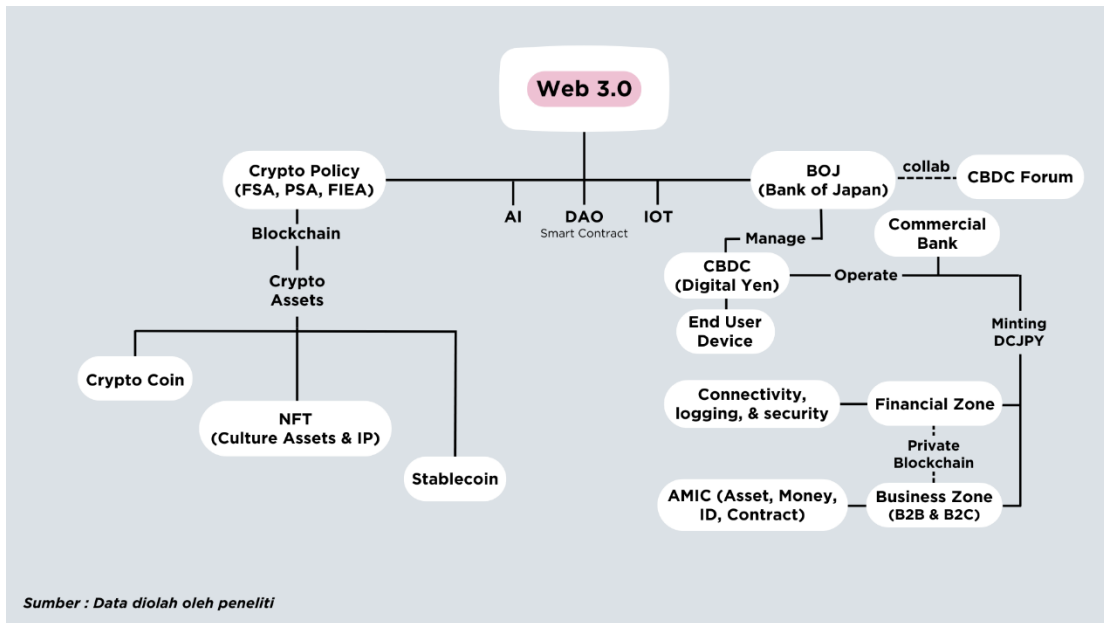
pengaturan platform *Decentralize Finance* (DEFI) untuk memaksimalkan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah pengembangan pedoman yang memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan sekaligus memungkinkan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini nantinya berkaitan dengan proyek “Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)” yang saat ini mulai dicoba untuk dijalankan oleh Bank Jepang, yakni Digital Yen.⁶⁷

Membahas lebih lanjut mengenai peluang kebijakan yang diperoleh Jepang, pembahasan penelitian selanjutnya akan lebih mengerucut untuk menyesuaikan topik yang dipilih. Selanjutnya peneliti akan memaparkan penjelasan terkait rumusan masalah yakni kontribusi kebijakan *cryptocurrency* terhadap pengembangan Web3, serta peluang prestisius Jepang mengenai inovasi digital yang sedang dijalankan. Menyoroti pernyataan perdana menteri pada 28 Agustus 2024 di konferensi WebX2024, pemerintah Jepang akan proaktif dalam mendukung ekosistem Web3 melalui berbagai strategi, salah satunya reformasi atau penyesuaian regulasi yang signifikan. Salah satu komponen utama dalam strategi Jepang untuk mendorong perkembangan startup Web3 adalah reformasi pajak yang baru-baru ini diterapkan oleh pemerintah. Perubahan ini dirancang untuk mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan baru di sektor tersebut, dengan menyesuaikan pajak atas keuntungan aset crypto yang masih belum direalisasikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik lebih banyak startup dan pengusaha, baik dari dalam negeri

⁶⁷ Nessi, *Op. Cit.*, hal. 5

maupun luar negeri, untuk terlibat dalam ekosistem Web3 yang berkembang di Jepang.⁶⁸

Gambar 2.3 Skema Web 3



Saat ini, Jepang tengah membangun ekosistem Web3 yang progresif dan berwawasan ke depan, dengan menekankan pada integrasi teknologi mutakhir seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), *stablecoin*, Non-Fungible Tokens (NFT), dan Decentralized Autonomous Organization (DAO). Upaya ini juga didukung oleh kerangka regulasi yang kuat yang bertujuan untuk melindungi konsumen sekaligus mendorong inovasi. Dalam Web3 *whitepaper*, pemerintah mengkonfirmasi bahwa “Kami sedang mengembangkan salah satu lingkungan bisnis

⁶⁸ Editor of Iolite, ‘Read the Liberal Democratic Party’s Web3.0 Policy What Is “Web3 White Paper 2024”?’ , *Iolite.Net*, 2024 <<https://iolite.net/magazine/vol8/interview-hideto-kawasaki>>.

web3 terdepan di dunia yang aman, terpercaya, namun juga mampu mendorong tantangan inovasi”.⁶⁹

Salah satu elemen utama dalam ekosistem ini adalah crypto asset, yang diatur melalui dua kerangka hukum utama, yakni PSA dan FIEA. Jepang menerapkan sistem pendaftaran dan standarisasi ketat bagi penyedia layanan pertukaran aset crypto, serta mewajibkan mereka untuk menyimpan minimal 95% aset pengguna dalam cold wallet, sebagai bentuk perlindungan konsumen. Selanjutnya, NFT dipandang sebagai katalis penting dalam pertumbuhan ekonomi digital di era Web3, terutama karena potensinya dalam mendorong ekonomi kreatif Jepang yang kaya akan kekayaan intelektual seperti anime, manga, dan permainan digital. Dalam NFT Whitepaper Japan, disebutkan bahwa “NFT dianggap sebagai katalis yang akan memperluas ekonomi digital secara kuat di era Web 3.0”.⁷⁰

Dalam aspek moneter, Jepang sedang mengembangkan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau yen digital, yang difasilitasi melalui program pilot oleh *Bank of Japan*. Program ini menekankan evaluasi teknis terhadap privasi pengguna, integrasi sistem eksternal, dan kesiapan infrastruktur pembayaran ritel. Seperti dilaporkan, “Bank telah melanjutkan program pilot dengan tujuan melakukan evaluasi teknis yang belum dijelajahi di tahap Proof of Concept, sambil

⁶⁹ Liberal Democratic Party, ‘The Web3 White Paper 2024’, *LDP Japan*, 2024 <[https://www.taira-m.jp/The web3 White Paper 2024 \(English%2Cver%29.pdf](https://www.taira-m.jp/The%20web3%20White%20Paper%202024%20(English%20Ver%29.pdf)>.

⁷⁰ Liberal Democratic Party, ‘NFT White Paper Japan ’ s NFT Strategy for the Web 3 . 0 Era Project Team Regarding NFT Policies’, *Op. Cit.*, hal. 52

memanfaatkan keterampilan dan wawasan sektor swasta”⁷¹. Sebagai pelengkap inovasi moneter berbasis yen, sektor swasta juga mengembangkan DCJPY, yaitu bentuk stable digital currency yang diterbitkan oleh bank komersial, bukan oleh bank sentral. DCJPY yang dipimpin dan dikelola oleh *DeCurret DCP Inc.* dibangun berdasarkan struktur *AMIC: Asset, Money, ID, dan Contract*, dan memungkinkan transaksi digital melalui blockchain dengan prinsip keamanan dan transparansi. Dalam DCJPY White Paper dijelaskan bahwa, “DCJPY yang kami tawarkan adalah metode di mana bank komersial menerbitkan dan mentransfer sebagai deposit bank”.⁷²

Kedua sistem moneter yang disebutkan memiliki karakteristik dan sistem yang berbeda. CBDC dikembangkan oleh *Bank of Japan* dengan sistem berbasis ledger digital yang menerapkan interoperabilitas, keamanan, dan kemudahan konsumen, serta saat ini masih difokuskan pada efisiensi transaksi dan skalabilitas dalam sistem pembayaran nasional. Sementara itu, DCJPY merupakan mata uang digital berbasis yen yang dikembangkan oleh sektor swasta (*DeCurret DCP Inc.*) dan bank-bank komersial. Sistemnya dirancang berdasarkan struktur AMIC yang

⁷¹ Bank of Japan, ‘Central Bank Digital Currency Experiments Progress on the Pilot Program (April 2024)’, *Payment and Settlement Systems Department, Bank of Japan*, April, 2024
<<https://www.boj.or.jp/en/paym/digital/dig240531a.pdf>>.

⁷² DeCurret DCP, ‘Digital Currency DCJPY White Paper’, November, 2023
<https://amicsign.com/whitepaper/6726fd7575h5011898ow146799u044220p190057915m73797d/DCJPY_WP_2023EN.pdf>.

memungkinkan integrasi tokenisasi aset, identitas digital, dan kontrak cerdas untuk mendukung transaksi otomatis dan transparan dalam berbagai sektor industri.⁷³

Meski berbeda secara struktur dan otoritas penerbit, kedua sistem ini berpotensi untuk hidup berdampingan dan saling melengkapi. DCJPY diakui sebagai solusi yang dapat digunakan secara fleksibel oleh sektor industri sambil menunggu kesiapan implementasi CBDC secara Nasional. Hal menarik ini juga diakui dan tertulis dalam white paper, “DCJPY bukanlah pesaing CBDC, tetapi dirancang sebagai solusi pelengkap oleh sektor swasta yang dapat mempercepat transformasi digital sambil menunggu implementasi resmi dari Bank of Japan”⁷⁴. Dengan demikian, CBDC dan DCJPY merepresentasikan dua pendekatan yang saling mendukung dalam mendorong transformasi keuangan digital Jepang menuju era Web3. Selain itu, Jepang juga mulai mengembangkan infrastruktur pendukung seperti DAO, *Decentralized Identity* (DID), dan *Verifiable Credentials* (VC), yang berfungsi untuk memastikan validitas identitas digital serta mendukung tata kelola komunitas terdesentralisasi. Ditegaskan dalam *Web3 White Paper 2024* bahwa, “Harapan meningkat terhadap *stablecoin* sebagai alat pembayaran, DAO sebagai infrastruktur komunitas, dan VC serta DID sebagai sarana pembuktian eksistensi individu”.⁷⁵

Mendukung langkah pemerintah pusat, beberapa langkah positif ini juga turut dimeriahkan oleh masyarakat lokal Jepang. Bentuk paling nyata dalam adopsi lokal

⁷³ Tertera pada lampiran hal. 101

⁷⁴ DeCurret DCP, hal. 4, *Op. Cit.*, hal. 56

⁷⁵ Liberal Democratic Party, ‘The Web3 White Paper 2024’, *Op. Cit.*, hal. 56

yakni adanya partisipasi besar di kota Fukuoka. Fukuoka adalah kota pelabuhan terbesar kedua di Jepang dan secara resmi telah ditetapkan sebagai Zona Strategis Khusus Nasional, dan berencana untuk menjadi pusat negara untuk semua hal Web3 dan crypto sejak 2022. Melalui kerjasama kemitraan dengan perusahaan konsultan Web3 *Astar Japan Labs*, pemerintah daerah Fukuoka bekerjasama dengan lebih dari 45 perusahaan yang bekerja dengan Astar, termasuk *Microsoft Japan* dan *Amazon Japan* dalam hal reformasi teknologi Web3. Menurut hasil kesepakatan, kota tersebut ingin menarik bisnis global yang kompetitif ke daerah tersebut. Pihak Astar akan secara teratur membagikan pendidikan khusus, pelatihan pemecahan kasus, dan hal lain yang dibutuhkan untuk mempersiapkan penerapan Web3 di daerah tersebut. Tak hanya itu, penerapan yang dimulai di Fukuoka ini merupakan langkah awal dari penerapan yang akan dilakukan di seluruh daerah nantinya.⁷⁶

Kebijakan ketat nyatanya tak hanya mengikat, namun juga membawa peluang emas bagi seluruh lapisan masyarakatnya. Meskipun perlu adanya penyesuaian di beberapa regulasi yang terlalu mengikat, nyatanya banyak perusahaan-perusahaan lokal tetap berusaha mencari kesempatan dengan menyesuaikan target pembangunan nasional pemerintah. Contohnya salah satu perusahaan asal Jepang, Fujitsu juga telah meluncurkan platform akselerasi Web3 sejak 8 Februari 2023. Platform ini menyediakan ekosistem pengembangan layanan berbasis blockchain, simulasi, dan AI

⁷⁶ Ary Julianto, 'Fukuoka Ingin Menjadi Pusat Pengembangan Web3 Dan Metaverse Di Jepang', *VOI.Id*, 2022 <<https://voi.id/teknologi/221487/fukuoka-ingin-menjadi-pusat-pengembangan-web3-dan-metaverse-di-jepang>>.

untuk memenuhi kebutuhan mitra perusahaan seperti universitas dan berbagai *start up* yang tertarik dengan manajemen konten digital, transaksi bisnis, kontrak, dan berbagai proses manajemen lainnya dengan sistem Web3.⁷⁷

Kebijakan *cryptocurrency* Jepang, mulai dari respons terhadap insiden Mt. Gox (2014) hingga pengesahan regulasi *stablecoin* pertama di dunia (2022), tidak hanya bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, tetapi juga mencerminkan upaya strategis Jepang dalam membangun identitas kompetitif di panggung global. Dengan kombinasi dukungan kebijakan, ekosistem lokal, dan partisipasi industri, menunjukkan bahwa Jepang memiliki peluang besar untuk menjadi pusat inovasi dalam teknologi Web3. Langkah-langkah seperti reformasi PSA 2020 dan dukungan pemerintah terhadap proyek Web3 di Fukuoka menunjukkan integrasi antara kebijakan substantif dan diplomasi ekonomi digital. Dalam Bab III, analisis akan difokuskan pada bagaimana kebijakan ini diimplementasikan melalui kerangka *competitive identity* Simon Anholt, dengan mengeksplorasi tiga komponen utamanya: strategi makro, kebijakan nyata, dan tindakan simbolis yang memperkuat citra Jepang sebagai pionir transformasi digital.

⁷⁷ Gile K., 'Japanese Tech Giant Fujitsu Introduces Web3 Acceleration Program', *Bitdegree.Org*, 2023 <<https://www.bitdegree.org/crypto/news/japanese-tech-giant-fujitsu-introduces-web3-acceleration-program>>.